

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pendidikan sumber daya manusia akan lebih siap dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pendidikan dijadikan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dengan asumsi bahwa jika suatu negara yang memiliki penduduk yang tingkat pendidikannya tinggi maka tingkat pertumbuhan negara tersebut akan tinggi pula yang diwakili dengan tumbuh pesatnya ekonomi negara tersebut.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 tahun 2003, 2003, Pasal 3, hlm. 3). Selain itu menurut Umar Tirtarahardja (dalam Tirtarahardja & Sulo, 2005, hlm. 300) menyebutkan bahwa “Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM”, maka sudah selayaknya pendidikan menjadi bagian dari program perencanaan strategis pemerintah.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) No.84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menyebutkan bahwa guru adalah pegawai negeri (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada Pendidikan dasar dan menengah. Dan angka kredit merupakan angka yang diberikan berdasarkan pada penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang guru dalam mengerjakan butir kegiatan yang diperlukan sebagai salah

Fery Apriadi, 2019

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BIDANG PENGEMBANGAN DIRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

satu syarat untuk kenaikan pangkat dalam jabatan guru. Keputusan ini dikembangkan sebagai upaya untuk menjamin guru selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman melalui pengembangan profesi berupa karya tulis ilmiah, teknologi tepat guna, karya seni, alat peraga dan pengembangan kurikulum yang dikonversi melalui sistem angka kredit untuk mengukur pencapaian prestasi guru sebagai persyaratan kenaikan golongan.

Kepmenpan tersebut membatasi bahwa hanya golongan IV/a ke atas saja yang memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan profesi sehingga banyak guru tidak memfokuskan pada kegiatan pengembangan profesi karena pada saat itu guru banyak berada pada golongan III/d ke bawah. Melalui peraturan pemerintah seperti Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pemerintah menyebutkan bahwa guru adalah seorang pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Sebagai upaya untuk menjaga keprofesionalannya maka pengembangan profesi harus diwajibkan tidak hanya berlaku bagi guru pegawai negeri golongan IV/a ke atas saja namun bagi seluruh golongan guru. Sehingga selanjutnya pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) No.16 tahun 2009 mengatur bahwa pengembangan profesi harus dilakukan dalam mekanisme berkelanjutan atau disebut Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif serta mewajibkannya bagi golongan III/a ke atas.

Pengembangan diri dalam wadah kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru dipandang sebagai sebuah wadah yang dapat mendorong proses tercipta dan berkembangnya kompetensi baru sehingga mampu menghasilkan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru berperan dalam membekali anak didik dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi masa depannya. Proses membekali anak didik ini memerlukan kemampuan khusus sehingga guru harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan perkembangan melalui wadah kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). Namun

pada kenyataannya setelah pelaksanaan kegiatan PKB masih terdapat guru memiliki nilai kompetensi rendah. Di tahun 2012 rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 44,50 dari 70 yang diharapkan (Baswedan, 2014, hlm. 3) begitu pula dengan hasil UKG tahun 2015, 2016 dan 2017 khususnya pada kompetensi guru SD walaupun selalu mengalami peningkatan namun masih memperlihatkan berada pada nilai paling rendah yaitu 22,08 jika dibandingkan dengan yang lain. Detil perbandingan antar jenjang Pendidikan tersebut diperlihatkan pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Rerata Hasil UKG Nasional tahun 2015 s.d 2017 Jenjang Pendidikan

Jenjang	Jumlah Peserta			Jml Org Modul 2017	Rerata UKG			↑↓	%
	2015	2016	2017		2015	2016	2017		
TK	89	72	89	181	43.74	65.82	68.23	↑	24.49
SD	185	219	185	372	40.14	63.8	62.22	↑	22.08
SMP	65	85	65	131	44.16	65.33	67.76	↑	23.61
SMA	25	28	25	50	45.38	66.66	69.55	↑	24.17
SMK	12	19	12	20	44.31	70.3	68.53	↑	24.22
SLB	7	3	7	14	46.45	66.79	71.7	↑	25.26

Sumber: Ditjen GTK, 2018 hlm. 2

Hasil UKG tersebut memiliki hubungan dengan pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) yang masih menjadi kendala seperti termuat dalam RENSTRA Kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan pembangunan pendidikan adalah; peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terutama berkaitan dengan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan dimana peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru juga masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Dan secara khusus pemerintah menggaris bawahi bahwa kegiatan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru belum terlaksana walaupun masuk dalam RENSTRA sebelumnya dan hal ini dijadikan sebagai salah satu strategi pengembangan kompetensi guru kedepannya (2015, hlm. 21).

Belum terlaksananya program Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) yang terlihat dalam RENSTRA seiring dengan data USAID PRIORITAS, dalam laporan akhirnya (RTI International, 2017, hlm. 104) menyebutkan bahwa hanya terdapat tujuh dari 93 Kabupaten/Kota mitra program

Fery Apriadi, 2019

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BIDANG PENGEMBANGAN DIRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | repositori.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang telah menyusun kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) lanjutan di tingkat daerah yaitu:

Tabel 1.2
Regulasi PKB di Kabupaten/Kota Mitra Program PRIORITAS tahun 2013 - 2017

No	Provinsi	Kab/Kota	Kebijakan
1	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	Peraturan Bupati Sidoarjo No. 38 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	Jawa Tengah	Kab. Batang	Peraturan Bupati Batang No. 64 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Jawa Tengah	Kab. Demak	Peraturan Bupati Demak No. 53 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
4	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga No. 2 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	Jawa Tengah	Kab. Blora	Peraturan Bupati Blora No. 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru di Lingkungan Kabupaten Blora
6	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	Peraturan Bupati Grobogan No. 48 Tahun 2013 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7	Aceh	Aceh Tamiang	Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sumber: RTI International, 2017, hlm. 104

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa kebijakan terkait dengan upaya peningkatan kemampuan guru secara profesional dan berkelanjutan belum mendapat perhatian khusus pemerintah daerah. Maka sudah sepantasnya pemerintah daerah memberikan perhatian pada upaya-upaya peningkatan kompetensi melalui PKB karena program Pengembangan Profesi bagi guru, mampu menyediakan berbagai bahan edukatif yang menarik, dan *best practices* penggunaan kurikulum yang

mampu mendukung peningkatan kompetensi mereka (De Groot-Reuvekamp, Ros, & Van Boxtel, 2018, hlm. 300).

Selain itu dalam penelitian CoraLynn B. Trewet & Nancy Fjortoft, (2013, hlm. 215) juga memperlihatkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ataupun *Continuing Professional Development* (CPD) mampu memberikan manfaat bagi pesertanya dalam memenuhi kegiatan penyusunan rencana dan praktik pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang diberikan menjadi lebih bermakna. Beberapa aspek penting yang diperlukan oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya dapat ditingkatkan melalui kegiatan ini, aspek penting tersebut berupa; pengetahuan, percaya diri, dan refleksi pembelajaran oleh siswa berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian yang dilakukan oleh Borg, Clifford, & Htut, (2018, hlm. 76) terhadap program *English for Education College Trainers Project (EfECT)* bagi guru yang telah berjalan 2 tahun di Myanmar.

Bentuk pengembangan diri dalam bentuk kegiatan *lesson study* pada forum guru mampu memberikan dampak positif bagi pembinaan dan peningkatan kompetensi pedagogik guru terutama dalam hal merancang pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan *plan do see* (Rozak & Fauziah, 2013, hlm. 14). Membangun komunitas belajar menggunakan pendekatan *lesson study* mampu memberikan tiga perubahan dalam pembelajaran yaitu; (1) perubahan dalam akademik; (2) perubahan dalam struktur pembelajaran melalui kegiatan eksperimen dan diskusi; (3) perubahan reaksi siswa selama pelajaran (Saito et al, 2006, hlm. 182)

Tidak hanya itu Kennedy (2005, hlm 235-250) juga menyebutkan bahwa intervensi pemerintah melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) mampu meningkatkan standar pengajaran ketika program pendidikan guru tidak mampu memenuhi kebutuhan guru yang kompeten. Dalam artikel yang sama ia juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam atau model PKB yang pelaksanaannya tidak dapat dipisah dalam pelaksanaannya. Model kegiatan tersebut adalah (1) *the training model*, (2) *the award-bearing model*, (3) *the deficit model*, (4) *the cascade model*, (5) *the standard-based model*, (6) *the coaching/mentoring model*, (7) *the community of practice model*, (8) *the action research model* and (9) *the transformative model*. Sembilan model yang disampaikan saling menunjang

dalam mewujudkan sasaran peningkatan kompetensi guru dengan begitu diperlukan kebijakan yang dapat mendukung semua kegiatan tersebut.

Di Indonesia bentuk kegiatan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) telah diklasifikasikan dalam tiga bidang (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 2009, Pasal 11 ayat c) yaitu:

1. Pengembangan diri meliputi; diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru,
2. Publikasi ilmiah meliputi; publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru,
3. Karya inovatif meliputi; menemukan teknologi tepat guna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum dan mengikuti pengembangan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) menjadi aspek penting dalam upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi berbagai tantangan yang selalu berubah-ubah saat ini. Maka, pemerintah menjadikan PKB bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 sebagai bentuk pengembangan kompetensi berkelanjutan walaupun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Dokumen ini muncul dalam bentuk perencanaan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB) salah satunya berupa kegiatan “peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP” (2013, hlm. 71). Pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu Pendidikan dan Kependidikan mengeluarkan buku pedoman PKB. Buku ini menjelaskan bahwa PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa (2010, hlm. 9). Lalu kemudian program ini kembali dikuatkan dan dilanjutkan dalam periode pemerintahan selanjutnya, terlihat dalam Peraturan Presiden RI No.

2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, pada Buku 2 Agenda Pembangunan Bidang, khususnya pada arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan yang berbunyi “meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui...pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP” (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 2-107).

Oleh karena itu arah Kebijakan strategis, dan sasaran strategis Kemendikbud 2015-2019 diarahkan pada PPB agar upaya-upaya peningkatan kompetensi guru menjadi lebih maksimal. Hal ini terlihat pada arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya tujuan strategis peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter yang dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berupa peningkatan mutu layanan, lulusan pendidikan dasar dan menengah; dan meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; yaitu pada bagian ke-10 yang menyebutkan; “meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan, melalui beberapa strategi yang salah satunya adalah poin (d) pelaksanaan PPB bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, hlm. 80).

Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mengatur delegasi kewenangan dari pusat ke daerah berupa pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan pusat dalam pengembangan pembangunan sektor pendidikan seperti yang telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Pembagian peran ini menegaskan bahwa pendidikan juga merupakan bagian dari tanggung jawab daerah dan harus menyiapkan rencana yang sejalan dengan pemerintah pusat. Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ataupun perubahan positif setelah mengikuti program PKB, namun hasil penelitian di Inggris menunjukkan, bahwa PKB yang diarahkan pada peningkatan kinerja dan pengembangan sekolah, juga berdampak menghalangi pemenuhan kebutuhan guru itu sendiri (Hardy & Melville, 2013b).

Lalu bagaimana dengan PKB yang berjalan di kabupaten Tasikmalaya?. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kegiatan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui kegiatan pengembangan diri. Dalam buku Pedoman Umum program PKB (Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, hlm. 6) menyebutkan, bahwa pengembangan diri merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar guru mampu mencapai dan/atau meningkatkan kompetensinya (mencakup kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis dan profesional) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan observasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, sekolah (meliputi guru dan kepala sekolah), dan pengawas sekolah ditemukan bahwa program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) di kabupaten Tasikmalaya secara perencanaan telah ada dan mengikuti desain program kerjasama sebelumnya (PRIORITAS) namun masih terdapat beberapa catatan yaitu: (1) tindaklanjut dari pelatihan (menggunakan dana APBD t.a 2016) berupa proses penerapan pembelajaran di sekolah yang di awasi oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolah belum berjalan; (2) pengelolaan, dan pelaksanaan pelatihan (menggunakan dana mandiri) belum tertata dan juga, belum sesuai dengan hasil UKG guru; (3) Pengelolaan Kegiatan kolektif guru (KKG, MGMP, pertemuan ilmiah dan seminar) masih belum terhubung dengan program PKB pemerintah; (4) Belum ada kebijakan daerah yang mengatur secara khusus tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga pendidik; (5) Penilaian terhadap keberhasilan pelatihan tidak melihat dari perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah; (6) Evaluasi terhadap program belum sepenuhnya dilakukan, karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga evaluasi belum berjalan dengan maksimal.

Perkembangan bidang pendidikan yang terjadi di kabupaten Tasikmalaya sangat menarik untuk di amati terlihat dari catatan diatas, evaluasi terhadap kegiatan program PKB menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah

memberikan dukungan pada guru dan permasalahan yang dihadapinya dalam menjalankan kegiatan, sehingga menghasilkan catatan tantangan di atas. Daerah kabupaten Tasikmalaya terbilang luas (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2018) yaitu 2.708,81 km² terdiri atas 39 kecamatan, 1.086 SD, 259 SMP dan 14.011 orang guru. Selain itu nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan cukup baik karena reratanya tidak terlalu jauh dengan nilai nasional dan provinsi, perbandingan nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Hasil Uji Kompetensi Guru Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenjang	Nilai UKG Kab. Tasikmalaya		Nilai UKG Prov. Jawa Barat		Nilai UKG Nasional	
		2015	2017	2015	2017	2015	2017
1	SD	57.20	71.34	56.65	62.22	40.14	62.22
2	SMP	59.23	73.89	60.70	71.97	58.25	67.76

Sumber: Dirjen GTK

Studi evaluasi terhadap kegiatan PKB dapat memberikan gambaran tentang kegiatan program prioritas, tantangan, strategi, pelaksanaan dan dampaknya terhadap guru di kabupaten Tasikmalaya. Xingyuan, et al (2018, hlm 1-32) menyebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil sebuah program sangat penting untuk mengetahui dampak sebuah program dalam kehidupan dengan melihat dari berbagai persepektif yang dibutuhkan dan memahami bahwa evaluasi dalam skala yang luas, jangka waktu lama dan pada komunitas berbasis program pendidikan dengan beragam intervensi dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, setidaknya penekanan pada tiga konsep evaluasi seperti efektivitas, sistematis dan peningkatan dapat memberikan gambaran keberhasilan sebuah program. Mereka memandang program sebagai sebuah siklus dan selalu berkembang seperti halnya kehidupan maka, evaluasi dibutuhkan untuk dapat mengukur keberhasilan sebuah program kegiatan dalam upayanya meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka, studi evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti fokuskan pada evaluasi bidang pengembangan diri tingkat sekolah dasar meliputi diklat fungsional (pelatihan-pelatihan), dan kegiatan kolektif guru dengan tujuan meningkatkan kompetensi (profesional dan secara khusus pada pedagogik) dan atau keprofesionalan guru melalui kegiatan seperti lokakarya, KKG, seminar, pertemuan ilmiah dan lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban

Fery Apriadi, 2019

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BIDANG PENGEMBANGAN DIRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

guru yang telah didukung oleh pemerintah daerah melalui model evaluasi program CIPP yang diperkenalkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Kegiatan pengembangan diri dapat dikategorikan sebagai sebuah program yang mengubah bahan mentah (*input*) menjadi sebuah produk, keluaran atau hasil (*output*). Maka model evaluasi CIPP sangat tepat, karena memberikan evaluasi pada *context*, *input*, *process* dan *product*. Evaluasi *contexts* difokuskan pada kebutuhan yang mendasar pada saat ini dan tujuan apa yang ditetapkan, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan penentuan tujuan, misi program secara objektif.

Evaluasi *input* difokuskan pada pendekatan yang digunakan, keterlibatan sumber daya yang dimiliki dalam membantu pencapaian tujuan program secara objektif. Begitu pula dengan evaluasi *proses* difokuskan pada proses berjalannya program dalam mencapai tujuan. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan program dalam rentang waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah *evaluasi produk/dampak*, evaluasi ini fokus pada hasil dari berjalannya program yaitu perubahan yang terjadi pada guru terutama dalam proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Mengetahui hasil evaluasi menjadi penting sebagai cara untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang program PKB secara formatif yang dilakukan oleh daerah. Kemudian akan memberikan beberapa strategi implementasi berdasarkan *best practices* sebelumnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya secara terus-menerus dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Ruang lingkup permasalahan penelitian ini terletak pada upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dalam perspektif manajemen program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development – CPD*) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Permasalahan dalam penelitian ini akan terfokus pada; *pertama*, evaluasi program PKB bidang pengembangan diri dari sisi konteks, input, proses dan produk, dan *kedua*, analisis keberhasilan dan keberlanjutan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa Barat.

Fery Apriadi, 2019

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BIDANG PENGEMBANGAN DIRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk memperjelas permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian maka pertanyaan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program PKB bidang Pengembangan diri dilihat dari empat bidang evaluasi yaitu:
 - a. Bagaimana program PKB bidang pengembangan diri dilihat dari evaluasi konteks (*Context evaluation*)?
 - b. Bagaimana program PKB bidang pengembangan diri dilihat dari Evaluasi masukan (*Input evaluation*)?
 - c. Bagaimana program PKB bidang pengembangan diri dilihat dari Evaluasi proses (*Process evaluation*)?
 - d. Bagaimana program PKB bidang pengembangan diri dilihat dari Evaluasi produk (*Product/out come evaluation*)?
2. Bagaimana analisis keberhasilan dan keberlanjutan program PKB bidang Pengembangan diri:
 - a. Apa saja kendala yang dihadapi Program PKB yang berjalan saat ini?
 - b. Apa kelebihan yang mendukung keberhasilan PKB dengan kondisi geografis kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana bentuk rekomendasi yang diberikan dari hasil temuan penelitian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bidang pengembangan diri di Kabupaten Tasikmalaya dan pengaruh atau dampak terhadap kemampuan guru di kabupaten Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri pada unsur konteks (*context evaluation*).
- b. Memperoleh informasi mengenai program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri pada unsur masukan (*Input evaluation*).
- c. Memperoleh informasi mengenai program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri pada unsur proses (*process evaluation*).
- d. Memperoleh informasi mengenai program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri pada unsur hasil (*produk evaluation*).
- e. Memperoleh informasi mengenai program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri terkait kendala yang dihadapi.
- f. Memperoleh informasi mengenai program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri terkait dengan aspek pendukung keberhasilan PKB yang sesuai dengan kondisi geografis Kab. Tasikmalaya.
- g. Memperoleh bentuk rekomendasi bagi pengembangan program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat dalam program pendidikan serta para pengembang ilmu pengetahuan. Terdapat dua kategori manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai analisis program *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (PKB) bidang pengembangan diri di Kabupaten Tasikmalaya, dan

Fery Apriadi, 2019

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BIDANG PENGEMBANGAN DIRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengetahui bentuk program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang sesuai bagi guru di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat menjadi bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

2. Secara operasional

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teoritik maupun praktis, khususnya dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bidang pengembangan diri di Kabupaten Tasikmalaya dan menilai sejauh mana hasil program ini terhadap peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar.
- b. Bagi lembaga, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja, dan memberikan perhatian khusus terhadap program PKB serta dampaknya terhadap tenaga pendidik di kabupaten Tasikmalaya.
- c. Bagi tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan program PKB mandiri bidang pengembangan diri.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sistematika tesis ini terdiri dari lima bab yang secara sistematis berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3260/UN40/HK/2018 (2018, September 3) yang menjabarkan dalam bentuk dokumen Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun Akademik 2018.

BAB I : Bagian ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

BAB II : Dalam bagian ini membahas mengenai kajian pustaka/ landasan teori, konsep-konsep, dalil-dalil dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu, dan posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang di teliti.

- BAB III : Membahas mengenai metode penelitian yang memaparkan alur penelitian mulai dari: desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, Analisis data, dan Isu etik.
- BAB IV : Temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian menjadi fokus utama pada bab ini, yang dijabarkan secara kritis dengan menyampaikan hasil analisis data dan mengevaluasi data apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.
- BAB V : Merupakan bagian akhir dari tesis ini, membahas mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.